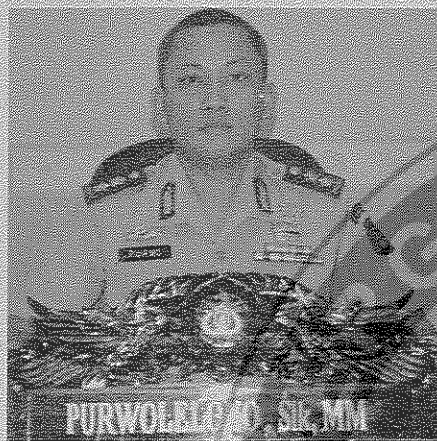


Komitmen Merupakan Kata Kunci Perwujudan Transparansi Dan Akuntabilitas Penerimaan Personel Polri



Oleh : Purwolelono, S.Ik, MM

Kabag Dalpers Biro Personel Polda Metro Jaya

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menciptakan perubahan diberbagai aspek kehidupan di Indonesia. Perubahan tersebut telah menimbulkan dampak positif maupun negatif bagi masyarakat. Indikator yang berdampak positif adalah, besarnya harapan masyarakat terhadap kualitas kinerja lembaga-lembaga pemerintah berkaitan dengan pelayanan publik. Diantara lembaga-lembaga tersebut, Polri merupakan lembaga yang banyak menyita perhatian masyarakat. Permasalahan yang senantiasa mendapat perhatian adalah pelaksanaan penerimaan personel Polri, terutama penerimaan Bintara Polri. Saat ini penilaian masyarakat terhadap proses tersebut masih belum transparan dan akuntabel serta sarat dengan unsur KKN. Hal itu mengakibatkan dampak negatif terhadap kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat.

Bintara Polri merupakan tulang punggung komponen Sumber Daya Manusia Polri (SDM Polri). Dilihat dari sisi jumlah keseluruhan

an SDM Polri, Bintara merupakan komponen SDM yang mendominasi organisasi Polri. Oleh karena itu, kualitas Bintara Polri sangat memberikan warna bagi citra pelayanan Polri pada semua sektor. Berkaitan dengan hal ini, maka Polri berkepentingan untuk merekrut SDM yang berkualitas dalam aspek mental kepribadian/kejiwaan, intelegensi, kesehatan jasmani dan rohani.

Berdasarkan uraian diatas, maka pola penerimaan personel Polri yang mengedepankan prinsip netral, objektif, bebas KKN, transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan rekrutmen sampai dengan pelaksanaan seleksi perlu pembenahan pemberdayaan fungsi pengawasan dan pengendalian dengan memberikan kesempatan kepada LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta instansi terkait merupakan gagasan yang progresif untuk meminimalisir KKN dan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.

Selama ini pelaksanaan penerimaan personel Polri telah berjalan sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan, namun masih ditemukan beberapa permasalahan yang memerlukan suatu perubahan pola dalam teknis pelaksanaannya. Adapun permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Kebocoran soal pada tahap pelaksanaan seleksi akademi maupun psikologi.
2. Penyalahgunaan wewenang

untuk penggandaan bahan test akademi maupun psikologi.

3. Pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian hasil tes yang tidak transparan, sehingga memberikan peluang terjadinya manipulasi data hasil tes psikologi, akademi, pemeriksaan kesehatan, dan kemampuan jasmani.
4. Adanya intervensi dari berbagai pihak kepada panitia untuk meluluskan calonnya (keponakannya, anaknya, saudaranya, dll).

5. Praktek KKN, yang ditandai dengan calon peserta menyediakan sejumlah uang untuk kelancaran proses penerimaan.

Apabila hal tersebut diatas terjadi, maka akan berdampak pada sosok personel Polri yang tidak sesuai dengan harapan dari masyarakat.

Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/663/XI/2006 tanggal 17 Nopember 2006 tentang Penerimaan Bintara Polri Gelombang I T.A. 2007 telah memberikan beberapa petunjuk untuk proses penerimaan Bintara Polri yang netral, objektif, bebas KKN, transparan dan akuntabel, yaitu sebagai berikut :

1. Proses penerimaan Bintara Polri yang berprinsip pada netralitas, objektifitas, bebas KKN, transparansi dan akuntabilitas.
2. Membentuk Tim Pengawas dari unsur Internal dan Eksternal Polri yang profesional (seperti Diknas, Dinas Kependudukan, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan

Sarjana Psikologi Indonesia, Akademisi, Guru Olah Raga, Tokoh Masyarakat/Agama dan lain-lain) untuk menyaksikan/memonitor pelaksanaan setiap tahapan seleksi secara ketat, kontinyu, dan transparan.

3. Memberdayakan Pengawas Internal (Itwasda, dan Bid Propam) untuk pengawasan pelaksanaan seleksi, namun tidak dilibatkan dalam memutuskan kelulusan dan bila terdapat permasalahan dapat menginformasikan kepada Panitia.
4. Meningkatkan aspek keamanan dan kerahasiaan sejak penyusunan soal ujian sampai dengan penyimpanan naskah hasil ujian.
5. Pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian terhadap seluruh hasil pengujian di lingkungan Mapolda secara transparan dengan menghadirkan unsur pengawas baik internal maupun eksternal.

Komitmen Polri dalam mewujudkan proses penerimaan Bintara Polri yang netral, objektif, bebas KKN, transparan dan akuntabel tersebut harus dilaksanakan oleh Panitia Daerah (Panda) Penerimaan Bintara di seluruh Polda di Indonesia.

Proses penerimaan Bintara Polri berawal dari kegiatan rekrutmen, yang meliputi kegiatan sosialisasi dan kampanye peribah telah dibukanya penerimaan Bintara Polri melalui penyebaran pamflet dan pemasangan spanduk yang mudah dilihat oleh masyarakat umum. Sebagai contoh dapat dilihat dalam tulisan dibawah ini :

Dalam Pelaksanaan pen-

“Pola penerimaan personel Polri yang mengedepankan prinsip netral, objektif, bebas KKN, transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan rekrutmen sampai dengan pelaksanaan seleksi perlu pembenahan pemberdayaan fungsi pengawasan dan pengendalian”.

daftar Bintara Gelombang I T.A. 2007 di Polda Metro Jaya diperoleh gambaran jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 5216 orang terdiri dari 4847 laki-laki dan 369 wanita, dengan perincian (lihat tabel) :

Dari table diatas, terlihat bahwa minat masyarakat untuk mendaftar menjadi Bintara Polri sangat besar, oleh sebab itu untuk memperoleh Bintara Polri yang berkualitas terbuka peluang yang cukup, sehingga bila kuota (jatah didik) Polda Metro Jaya sebesar 500 orang, maka perbandingan antara kuota dengan peserta adalah

No.	Pabanrim	Animo		Jumlah
		Laki-laki	Wanita	
1.	Restro Jakpus	168	11	179
2.	Restro Jakut	469	35	504
3.	Restro Jakbar	380	17	397
4.	Restro Jaksel	561	45	606
5.	Restro Jaktim	820	82	902
6.	Restro Tangerang	669	45	714
7.	Restro Bekasi	595	44	639
8.	Restro Depok	588	59	647
9.	Res Kep. Seribu	16	2	18
10.	Res Tangerang	223	10	233
11.	Res Bekasi	358	19	377
Jumlah		4847	369	5216

1 : 10.

Dalam pelaksanaan seleksi penerimaan Bintara Polri di Panda Polda Metro Jaya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan rekrutmen dilakukan penyebaran pamflet dan pemasangan spanduk tentang pengumuman penerimaan Bintara Polri dan pemasangan spanduk yang bertuliskan "Masuk Polri tanpa pungutan biaya", hal ini untuk mempertegas kembali bahwa masuk menjadi anggota Polri sama sekali tidak mengeluarkan biaya.
2. Dalam pelaksanaan pendaftaran/pemeriksaan administrasi awal pada tiap-tiap Pabanrim (Panitia Pembantu Penerimaan) atau Polres/Polres Metro dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dari Mabes Polri dengan melibatkan Dinas Pendidikan untuk pemeriksaan keabsahan ijazah dan Dinas Kependudukan untuk pemeriksaan KTP/Domisili dan Akte Kelahiran, untuk meminimalisir intervensi dari pihak manapun.
3. Para orang tua/wali dikumpulkan oleh Kapolres selaku Ketua Pabanrim guna diberikan arahan tentang untuk menjadi anggota Polri tidak dipungut biaya, dan tidak dibenarkan memberikan uang kepada siapapun termasuk kepada panitia.
4. Setiap pelaksanaan ujian/pemeriksaan selalu melibatkan Tim Pengawas Internal dan Eksternal profesional dibidangnya masing-masing, antara lain dalam pelaksanaan seleksi :
 - a. Psikologi melibatkan Himpunan Psikologi Jakarta Raya (HIMPSI JAYA).
 - b. Akademik melibatkan Dinas Pendidikan Nasional.
 - c. Pemeriksaan Kesehatan

melibatkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

- d. Kesamaptaan Jasmani melibatkan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Jakarta (FPOK UNJ).
5. Dalam pelaksanaan pemeriksaan hasil ujian dilaksanakan dengan pola sebagai berikut :
 - a. Setelah pelaksanaan ujian selesai dilaksanakan, maka hasilnya langsung dimasukkan ke dalam brankas/boks yang telah disediakan sebelumnya kemudian disegel dan dikunci sebanyak 3 (tiga) buah, adapun 3 (tiga) buah kunci tersebut masing-masing disimpan oleh :
 - 1) Ketua Panda yang dilimpahkan kepada Ketua Pelaksana.
 - 2) Kabid Propam.
 - 3) Masing-masing Ketua Tim tahapan seleksi.
 - b. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, maka dilakukan pemeriksaan oleh masing-masing Ketua Tim pelaksana seleksi beserta anggotanya bertempat di Aula Biro Personel Lantai 3 dengan disaksikan oleh :
 - 1) Tim Pengawas Internal (Itwasda, dan Bid Propam),
 - 2) Tim Pengawas Eksternal (Profesional dibidang masing-masing seleksi, Tokoh Agama/Masyarakat dan LSM)
 Dalam pelaksanaan pemeriksaan hasil tes tersebut dilakukan terbuka untuk umum (bagi siapa saja diperbolehkan menyaksikan jalannya pemeriksaan), seperti gambar dibawah ini :
 - c. Dalam pelaksanaan pemeriksaan hasil tes yang telah ditetapkan jadwalnya oleh masing-masing Ketua Tim Pelaksana Seleksi, dalam satu hari masih belum selesai, maka akan dilanjutkan pada



hari berikutnya, oleh sebab itu hasil pemeriksaannya harus dipindahkan ke dalam CD/R dengan cara cut (memotong) dan paste (menempelkan) untuk selanjutnya di segel dan disimpan dalam brankas/boks yang telah disediakan sampai dengan pelaksanaan pemeriksaan selesai dilaksanakan.

- d. Setelah pelaksanaan pemeriksaan hasil tes selesai, hasilnya ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana Seleksi, 2 (dua) orang perwakilan Tim Pengawas Internal, 2 (dua) orang perwakilan Tim Pengawas Eksternal serta diketahui oleh Ketua Pelaksana.
- e. Hasil pemeriksaan hasil tes yang telah ditanda tangani tersebut seketika itu diteruskan kepada masing-masing Pabanrim untuk diumumkan kepada para peserta.
- f. Setelah pelaksanaan pemeriksaan selesai secara keseluruhan, maka kemudian diterbitkan Surat Keputusan Kapolda tentang Kelulusan yang ditanda tangani oleh Kapolda Metro Jaya selaku Ketua Panda.

Proses penerimaan Bintara Polri yang netral, objektif, bebas KKN, transparan dan akuntabel tersebut diharapkan akan meminimalisir terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang pernah terjadi sebelumnya. Oleh sebab itu Polda Metro Jaya selaku Panda berharap kepada seluruh masyarakat untuk dapat berpartisipasi mewujudkan Komitmen Polri dalam proses penerimaan Bintara Polri yang netral, objektif, bebas KKN, transparan dan akuntabel. Selain itu Panda juga menghimbau kepada segenap lapisan masyarakat (peserta penerimaan Bintara Polri) untuk :

1. Mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya agar dapat mengikuti seleksi Psikologi, Akademik, Kesehatan Badan, dan Kesamaptaan Jasmani,
2. Tidak terlibat dalam praktek KKN baik dengan orang lain maupun dengan Panitia,
3. Tidak menggunakan Perwalian Penunjang (Sponsorship) dalam proses penerimaan Bintara Polri.

Sehingga tujuan Polri untuk mendapatkan Bintara Polri yang berkualitas dapat tercapai yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya kualitas kinerja pelayanan kepada masyarakat.***